

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).¹ Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.² Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian rupa sehingga dapat disalahgunakan fungsinya.

Penyalahgunaan narkotika dan jenis obat-obat berbahaya lainnya ialah secara terus menerus/berkesinambungan, sekali-kali (kadang-kadang), secara berlebihan, dan tidak menurut petunjuk dokter atau non medik.³ Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), kejahatan ini

¹ Anggota IKAPI, *Undang-undang Psikotropika Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya*, (Bandung: Fokus Media, 2011), hal. 52.

² Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 163.

³ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, dan Amir Mukhsin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 489.

tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri.⁴ Pemerintah saat ini telah menetapkan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagai persoalan yang sangat membahayakan bagi bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh maraknya pengguna narkoba yang tidak hanya terjadi pada kalangan dewasa, namun juga dikonsumsi oleh remaja dan anak di bawah umur.

Maraknya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di semua kalangan ini didukung oleh semakin banyaknya pengedar narkoba yang telah sampai di pelosok negeri Indonesia. Wujud pengawasan dan regulasi pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkoba melalui kebijakan hukum lewat peraturan perundang-undangan dan kelembagaan dengan jalan membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.⁵

Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko menyebutkan, ada peningkatan peredaran narkoba selama tahun 2019 dari tahun sebelumnya sebesar 0,03 persen. Pengguna paling banyak berusia 15 hingga 65 tahun dan menembus angka 3.600.000 orang.⁶ Berdasarkan artikel tersebut dapat dilihat bahwa rentang usia 15

⁴ Made Darma Weda. *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Guna Widya, 1999), hal. 80.

⁵ <https://bnn.go.id/profil/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2020.

⁶ Liputan6.com, "Kepala BNN: Pengguna Narkoba pada 2019 Tembus 3,6 Juta Orang" <https://www.liputan6.com/news/read/4127338/kepala-bnn-pengguna-narkoba-pada-2019-tembus-36-juta-orang>, diakses pada tanggal 12 Februari 2020.

sampai 65 tahun merupakan kelompok pekerja yang telah memiliki penghasilan, sehingga mereka dapat membeli dan mengkonsumsi narkoba secara leluasa.

Penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁷ Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Salah satu sifat narkoba adalah dapat membuat penggunanya kecanduan dan ketergantungan dan hal inilah yang menyebabkan banyak mantan pecandu narkoba terjerumus untuk mengulangnya lagi. Pengulangan kejahatan dalam pergaulan sehari-hari, khususnya diantara para penjahat/preman dikenal dengan “*residivis*” (seharusnya *recidive*). Pengertian *recidive* secara yuridis adalah seseorang yang melakukan kejahatan dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan kejahatan

⁷ Anggota IKAPI, *Op.cit.*, hal. 54.

lagi. Pengulangan kejahatan (*Recidive*) dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok kejahatan tertentu, baik yang berupa kejahatan di dalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran di dalam Buku III. KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu, dengan demikian KUHP menganut Sistem *Recidive* Khusus, artinya “pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis kejahatan (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.”⁸

Pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia dapat dipengaruhi beberapa faktor, seperti faktor kemudahan memperoleh narkoba, faktor keluarga, faktor lingkungan sosial, faktor pertemanan, serta kurang optimalnya BNN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.⁹ Menurut undang-undang, seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus direhabilitasi agar sembuh dari kecanduan narkoba, namun dalam prakteknya pelaku tindak pidana narkoba ini tidak direhabilitasi melainkan di hukum penjara. Gap antara undang-undang dan praktek ini terjadi akibat lemahnya tugas dari BNN, yakni hanya sebagai penyidik bersama kepolisian dan yang memiliki wewenang dalam penuntutan perkara adalah Jaksa. Kurang optimalnya jaksa dalam menjalankan wewenangnya dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni anggaran dari pemerintah yang relatif kecil dan

⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hal. 198.

⁹ I Gusti Ayu Putu Wulan B. dan Ni Luh Indah Desira S., *Kebutuhan Psikologis pada Pecandu Narkoba (Tinjauan Kualitatif dengan Teknik Journaling sebagai Metode Pengalian Data)*. Vol. 6 No. 2, Jurnal Psikologis Udayana 2019, hal. 401.

keterbatasan jumlah jaksa apabila dibandingkan dengan jumlah pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hal ini menyebabkan jaksa tidak bersedia membuat tuntutan pidana sekaligus rehabilitasi karena jaksa tidak dapat mengawasi, mendampingi, serta membuat laporan mengenai pelaku tindak pidana narkoba.

Penelitian dari Rezza¹⁰ yang berjudul “Analisis Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba” menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor individu, faktor biologis dan faktor psikologis. Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan, keluarga, pendidikan, agama, dan sosial. Faktor lingkungan tempat tinggal yang sangat mudah untuk mendapatkan narkoba bahkan menjadi sarang peredaran narkoba dan faktor keluarga yang kurang memberi perhatian merupakan faktor pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Pemerintah telah melakukan langkah konkret dalam program rehabilitasi, yaitu BNN telah menginisiasi terbentuknya layanan rehabilitasi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yaitu Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). IBM dibentuk sebagai solusi atas kendala sulitnya akses rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba di daerah terpencil. Deputy Rehabilitasi BNN RI, Drs. Yunis Farida Oktoris, M.Si menambahkan bahwa, dalam upaya penanggulangan narkoba, khususnya di bidang rehabilitasi, pemerintah daerah juga diharapkan berperan secara maksimal. Instruksi Presiden No.6 Tahun 2018 mengamanatkan

¹⁰ Muhammad Fachri Rezza, Skripsi: “Analisis Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba” (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018).

Pemerintah Daerah untuk berperan aktif menangani masalah P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), salah satunya penyediaan layanan rehabilitasi.¹¹

Program rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah ini ternyata tidak berjalan secara efektif dan optimal, dibuktikan dengan masih banyaknya mantan pecandu narkoba yang kembali melakukan kejahatan ini. Contoh kasus yang berkaitan dengan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah kasus yang dialami Joni. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, penggerebekan berawal dari informasi yang diberikan masyarakat, lalu petugas melakukan penyelidikan dan menangkap Joni dan hingga saat ini belum diketahui apakah Joni merupakan bandar narkoba, pengedar ataupun kurir. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Joni merupakan residivis yang belum lama menghirup udara bebas karena kasus serupa. Polisi masih mengembangkan kasus ini guna mengetahui sejauh mana keterlibatan Joni dalam peredaran sabu-sabu tersebut, polisi juga masih mengembangkan adanya dugaan tersangka lain dalam kasus ini.¹²

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Malang keluar sebagai Juara 1 Satuan Kerja (Satker) terbaik tingkat Nasional untuk kategori BNN Kota/Kabupaten se-Indonesia. BNN RI melakukan penilaian pelaksanaan anggaran TA 2018 mulai BNN Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Aspek yang dinilai diantaranya meliputi kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan

¹¹ Bnn.go.id, “Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM); Mempermudah Akses Rehabilitasi Narkoba”, <https://bnn.go.id/intervensi-berbasis-masyarakat-ibm-mempermudah-akses-rehabilitasi-narkoba/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2020.

¹² Muhammad Fachri Rezza, *Op.cit.*, hal. 5.

atas regulasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan masing-masing kriterianya.¹³

Terpilihnya BNN Kabupaten Malang sebagai Satker terbaik tingkat nasional ternyata tidak menjadi jaminan di daerah tersebut dapat menurunkan tingkat penyalahgunaan dan pengulangan narkotika. Hal ini dibuktikan dengan laporan Polres Malang yang berhasil mengungkap 314 kasus narkoba sepanjang tahun 2019. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2018, yakni sejumlah 303 kasus. Kasubag Humas Polres Malang Ipda Nining Husumawati menyebut beberapa wilayah di Kabupaten Malang yang menjadi area rawan peredaran narkoba. Kecamatan Turen merupakan wilayah yang paling tinggi potensinya, kemudian disusul secara berturut-turut Kecamatan Pakis, Pakisaji, Kepanjen, dan terakhir Sumberwanjing Wetan.¹⁴

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti baik pada aspek alasan gap teoritik, gap penelitian terdahulu maupun pada aspek fenomena empiris, peneliti hendak melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang dan Sat Resnarkoba Polres Malang)”**.

¹³ Beritajatim.com, “BNN Kabupaten Malang Juara 1 Satker Terbaik Nasional”, <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/bnn-kabupaten-malang-juara-1-satker-terbaik-nasional/>, diakses pada tanggal 13 Februari 2020.

¹⁴ Radarmalang.id, “5 Kecamatan Rawan Peredaran Narkoba”, <https://radarmalang.id/5-kecamatan-rawan-peredaran-narkoba/>, diakses pada tanggal 13 Februari 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan program rehabilitasi bagi pelaku pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba?
2. Apakah hambatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang dan Sat Resnarkoba Polres Malang dalam menerapkan program rehabilitasi terhadap pelaku pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan program rehabilitasi bagi pelaku pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional.
2. Untuk mengetahui macam-macam hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang dan Sat Resnarkoba Polres Malang dalam menerapkan program rehabilitasi terhadap pelaku pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan program rehabilitasi terhadap pelaku pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya serta sebagai bahan perbandingan pada penelitian sebelumnya dengan tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu pemerintah dan instansi.

a. Bagi Pemerintah, dengan diketahuinya pelaksanaan program rehabilitasi terhadap pelaku pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah selaku pembuat hukum dan peraturan dalam menentukan arah dan strategi penegakan hukum selanjutnya, khususnya dalam mengatasi masalah-masalah narkoba.

b. Bagi Instansi, yaitu Badan Narkoba Nasional, Balai Rehabilitasi, dan Kepolisian (Sat Resnarkoba) agar memperhatikan tatanan dan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah dan juga sebagai bahan introspeksi diri agar lebih baik lagi dalam penanganan rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

E. Kegunaan Penulisan

1. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini, dan dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak yang mempelajari Ilmu Hukum khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum, dan sebagai bahan pemikiran dan menambah kepustakaan di bidang Ilmu Hukum.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi solusi bagi pengguna narkoba di Indonesia dan bagi Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, serta lembaga lainnya yang melaksanakan program rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna atau pecandu narkoba dan obat-obat terlarang, serta berbagai pihak yang memerlukan melakukan penelitian lebih lanjut tentang rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau penelitian sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dilapangan. Pendekatan Empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).

2. Penetapan Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di daerah Kabupaten Malang, dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Malang merupakan lokasi penelitian representatif karena secara kuantitas jumlah pengguna dan korban narkoba di Kabupaten Malang tergolong tinggi dan bertambah setiap tahunnya, sehingga menarik niat penulis meneliti hal tersebut. Selain itu agar penulis dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif dan berkaitan dengan objek penelitian, sesuai dengan tujuan penulisan skripsi yaitu untuk meneliti dan mengamati sejauh mana Pelaksanaan program rehabilitasi terhadap pelaku pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Malang. Untuk penelitian lapangan penulis memilih lokasi di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Malang dan Sat Resnarkoba Polres Malang, dengan alasan pasti tersedianya data karena dilihat dari banyaknya jumlah pengguna dan korban narkoba di Kabupaten Malang.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data yang terhimpun dari hasil penelitian ini, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, dapat digolongkan dalam 2 (dua) jenis dan sumber data yaitu :

- a. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang, Sat

Resnarkoba Polres Malang, dan pihak-pihak yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal, karya ilmiah, surat kabar, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan antara lain :

a. Wawancara

Menurut Sugiyono,¹⁵ wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara ini dilakukan dengan pihak dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang dan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Malang:

- 1) Drs. Mohammad Khoirul, MM. Kasi Rehabilitasi BNN Kabupaten Malang.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 194.

2) IPTU Daya Wastuti, S.H. KAUR MINTU Sat Resnarkoba Polres Malang.

3) Nova Dwi Hartanto. Asisten Konselor Seksi Rehabilitasi BNN Kabupaten Malang.

b. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini,¹⁶ observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian. Peneliti melakukan observasi di BNN Kabupaten Malang dan Sat Resnarkoba Polres Malang.

c. Dokumentasi

Menurut Hamidi,¹⁷ metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

5. Teknik Analisis

Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini,

¹⁶ Hadari Nawawi dan M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hal. 74.

¹⁷ Hamidi, *Metode Penelitian: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004), hal. 72.

kemudian menarik satu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum, penulis membagi sistematika penulisan dalam empat bab yang disusun secara sistematis dan saling berkaitan antara sub babnya. Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mendapat suatu gambaran jelas dan mempermudah dalam memahami penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I, sebagai Bab Pendahuluan, dibahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penulisan, metode penelitian, sistematika penulisan

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II yaitu Tinjauan pustaka yang berisikan tentang uraian dasar teori dari penulisan hukum ini yang meliputi: Narkoba, Tindak Pidana, Rehabilitasi, dan Residivis.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III merupakan pembahasan pokok atas permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini. Menguraikan tentang hasil penelitian pembahasan dan wawancara terkait dengan pelaksanaan program rehabilitasi terhadap pelaku pengulangan tindak pidana narkotika.

4. BAB IV PENUTUP

Dalam Bab IV, sebagai Bab Penutup, merupakan akhir dari penulisan hukum yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Juga disertakan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

